

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “ DAMPAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2003-2008” yaitu;

Pertama, penulis tertarik dengan dampak kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam bidang pendidikan bagi hubungan bilateral kedua negara.

Kedua, adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia yang melibatkan dunia pendidikan, dimana pendidikan merupakan fondasi dasar pembangunan bagi kedua negara tersebut. Yang merupakan objek pelaksanaan kerjasama.

Ketiga, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam bidang pendidikan.

Keempat penulis ingin mengetahui keuntungan yang merupakan dampak yang diperoleh pemerintah Indonesia terutama bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, dengan adanya kerjasama tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ingin mengetahui manfaat kerjasama regional kedua negara yang terjalin antara Australia dan Indonesia dilihat dari persepsi Australia yaitu berkaitan dengan dampak pemberian bantuan beasiswa Pemerintah Australia kepada pelajar Indonesia terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia.

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan fondasi dasar pembangunan dan faktor penyumbang vital bagi proses pengentasan kemiskinan. Pendidikan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pendidikan membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan sehingga terjadi peningkatan standar hidup.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama mengakui bahwa masalah pokok di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas serta aktivitas yang relevan di sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga perguruan tinggi. Sampai saat ini bangsa Indonesia menghadapi 2 hambatan utama dalam usaha meningkatkan bidang pendidikan. Pertama, kekurangan biaya dan perlengkapan yang bisa dibeli dengan uang. Kedua, hambatan-hambatan yang bukan material sifatnya, dimana penambahan uang tidak akan segera memperlihatkan efeknya.¹

¹ C. E. Beeby. *Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan ekonomi dan Sosial, 2003), 2-3

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Indonesia mempunyai inisiatif untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga guna mengantisipasi dua hambatan tersebut diatas. Salah satunya dengan negara Australia. Pemerintah Indonesia membuat kesepakatan bersama dengan Australia guna memajukan pendidikan di Indonesia dan hal tersebut disambut baik oleh pemerintah Australia melalui program-program yang telah disepakati bersama.

Australia memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan di sektor pendidikan serta kemungkinan bantuan lain melalui konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan donor-donor lain, termasuk Bank Dunia dan Amerika Serikat. Sebagai contoh, Australia bekerja erat dengan Bank Dunia serta Pemerintah Indonesia dalam melakukan peninjauan di sektor pendidikan. Hasil peninjauan yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah Indonesia, akan memberikan suatu kerangka acuan bagi bantuan pendidikan baru dari Australia, Amerika Serikat, bank pembangunan multilateral serta donor-donor lain. Australia juga mendorong kemitraan para donor untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia dalam suatu pendekatan terkoordinasi sampai ke implementasi prioritas reformasi yang diidentifikasi dalam peninjauan tersebut.

Selain bantuan bagi pendidikan dasar, proyek-proyek bantuan Australia mendukung peningkatan kualitas teknis dan pendidikan kejuruan serta berusaha mencapai kebutuhan pembangunan sumber daya manusia Indonesia di bidang-bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan.

Dengan adanya kerjasama dan bantuan dari Australia diharapkan sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dalam kancah kemajuan dunia

globalisasi yang semakin berkembang. Selain itu diharapkan dengan adanya bentuk-bentuk nyata dari kerjasama yang ada, mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Sehingga pendidikan membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan sehingga terjadi peningkatan standar hidup.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apa dampak kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dalam bidang pendidikan tahun 2003-2009?”

E. Landasan Teoritik

Teori digunakan untuk membantu kita dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis.² Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi. Menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga yang meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.³ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu.⁴

² Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 21

³ Moehar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta : LP3ES, 1990), 185

⁴ *Ibid*, 21

Untuk menyelesaikan masalah yang ada maka penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional, dan Teori Kemitraan (*Partnership*) sebagai salah satu bentuk kerjasama.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara.⁵ Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat vital bagi negara yaitu mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada “interest” secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat lebih akurat jika dianggap sebagai “national interest”. Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak dihiraukan sama sekali terhadap prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realis, berlawanan dengan kebijakan idealis yang memperhatikan prinsip moral internasional.⁶

Kepentingan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu berbeda dengan kurun waktu lainnya, sehingga mengakibatkan keadaan politik internasional selalu berubah-ubah. Akan tetapi bagaimanapun juga perubahan

⁵ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, dalam bukunya Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1994), 18

⁶ Jack C. Plano dan Roy Olton, “*Kamus Hubungan Internasional*”, (Jakarta: Putra A Bardin, 1999),7

politik internasional, kebijakan luar negeri harus selalu mengabdikan kepada kepentingan nasional. Unsur fundamental politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu: tujuan nasional yang ingin dicapai dan instrument yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai dapat dilihat pada kepentingan nasional suatu negara, sedangkan instrument untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri.⁷

Namun dalam perumusan masalah kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia dalam dunia pendidikan dilihat dari persepsi Australia, tujuan yang hendak dicapai Australia adalah kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara bagi negara Australia dan instrumen yang digunakan Australia untuk mencapai kepentingan tersebut dengan beasiswa pendidikan yang diberikan kepada Indonesia dengan strategi kerjasama di bidang pendidikan.

2. Teori Kemitraan (*Partnership*) sebagai Salah Satu Bentuk Kerjasama

Kerjasama atau lebih sering dikenal sebagai kemitraan (*partnership*) atau dikenal dengan istilah gotong royong pada esensinya adalah hubungan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan. Menurut Teece⁸, kemitraan adalah:

⁷ Lihat di Soesiswo Soenarko, *Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia*, dalam Juwono Sudarsono, dkk., *Perkembangan Studi HI dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1996), 97

⁸ Teece, D.J., Competition, cooperation, and innovation: organizational arrangements for regimes of rapid technological progress. *Journal of Economic Behavior and Organization* 18, 1992, 1.

" suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu".

Kemitraan yang baik adalah yang mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi masing-masing pihak yang bermitra, dengan kata lain yang bisa memberi *win-win solution*. Nilai lebih ini tidak harus berupa materi, namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan (seperti: pendidikan, kesehatan, penyediaan tenaga kerja), bertambahnya akses seperti kerjasama sosial ekonomi pendidikan antara negara yang berkerjasama dan lain sebagainya.

Pada dasarnya setiap negara akan menghadapi keterbatasan wilayah, karena setiap negara mempunyai batas-batas geografis yang diakui oleh dunia⁹. Artinya tata hubungan antar bangsa, tidak dibenarkan satu negara dengan semena-mena menguasai wilayah negara lain. Selanjutnya dikatakan bahwa keterbatasan wilayah menyebabkan setiap negara berusaha menggunakan sumberdaya yang dikuasai secara optimum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Setiap negara cenderung memperkuat diri sendiri baik secara ekonomi, politik-militer, budaya lokal (*origin*) karena anggapan bahwa negara lain setiap saat bisa menjadi ancaman.

Linton¹⁰ mengemukakan beberapa alasan mengapa harus bermitra adalah:

" untuk bisa mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama (kesejahteraan ekonomi, sosial dan menjaga keamanan bersama), beberapa pihak seringkali tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Keterbatasan sumber daya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing kelompok telah 'memaksa' untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki dan melakukan kerjasama. Kemitraan tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan

⁹ Council on Competitiveness, *Endless Frontier, Limited Resources: U.S. R&D Policy for Competitiveness*. (Washington: Council on Competitiveness, 1996), 112

¹⁰ Linton, L., 1995, *Op cit.*, 76

bersama. Setiap pihak yang bermitra bisa saja memiliki tujuan sendiri-sendiri. Esensi terpenting adalah berbagi sumber daya dan saling menguntungkan.

John R. Commons¹¹ dalam bukunya yang berjudul *Institutional Economics* mengemukakan pentingnya kerjasama dengan orang lain, atau kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dengan apa yang disebut “pengendalian bersama” (*collective controls*), yang mempunyai tugas dalam mengawasi dalam proses tawar-menawar dan harga serta transaksi yang dijalankan. Dalam aspek ekonomi, John R. Commons dalam Mubyarto (2002), mengakui prinsip ekonomi neoklasik tentang kelangkaan (*scarcity*) dan asas efisiensi untuk mengatasinya tetapi berbeda dengan teori ekonomi klasik dalam cara-cara mencapai “ harmoni” atau “keseimbangan” yaitu tidak dengan menyerahkan pada mekanisme pasar melalui persaingan (*competition*) tetapi melalui kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*). Sehingga akan tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dalam jangka pendek di satu sisi dan aspek pemerataan dan sustainabilitas dalam jangka panjang disisi lain.

Menurut pendapat Eisler, Rione & Montuori, Alfonso¹² ada beberapa model hubungan kemitraan, yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan

¹¹ Eisler, Rione & Montuori, Alfonso, *Op cit.*, 66

diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberian bantuan beasiswa Pemerintah Australia kepada pelajar Indonesia terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia dapat memberi manfaat pada kedua belah pihak baik Indonesia dan Australia dalam aspek politik-keamanan, sosial budaya dan ekonomi. Kerjasama dalam bidang pendidikan didasari oleh latar belakang sumber daya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang banyak memiliki perbedaan antara kedua negara, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan bersama seperti dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, kepentingan ekonomi, menghindari konflik antara negara serta perasaan saling mempercayai dan saling menghormati kedua negara dalam aspek sosial budaya. Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi (seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan, dan manfaat ekonomi lainnya), namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses (seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara), serta saling menguntungkan atau *mutual benefit* yaitu kerjasama memberi manfaat pada kedua negara baik Indonesia dan Australia.

¹² *Ibid*, 67

F. Hipotesa

Dampak pemberian bantuan beasiswa Pemerintah Australia kepada pelajar Indonesia terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia dapat dilihat dari aspek politik-keamanan, sosial-budaya dan ekonomi, antara lain:

1. Dampak kerjasama Australia-Indonesia di bidang pendidikan terhadap bidang politik-keamanan adalah meningkatkan stabilitas keamanan kawasan yaitu dilihat dari indikator adanya peningkatan stabilitas keamanan kawasan, minimnya konflik kedua negara setelah adanya peningkatan kerjasama di bidang pendidikan.
2. Dampak kerjasama Australia-Indonesia di bidang pendidikan terhadap aspek sosial budaya adalah meningkatkan perasaan untuk saling memahami budaya (*cultural understanding*), yaitu dilihat dari adanya peningkatan kegiatan kerjasama antara kedua negara dalam bidang sosial (kegiatan sosial kemasyarakatan), kesenian dan kebudayaan.
3. Dampak kerjasama Australia-Indonesia di bidang pendidikan terhadap aspek ekonomi adalah terdiri dari dampak langsung dan dampak tidak langsung (*multiplier effect*). Dampak langsung adalah adanya peningkatan nilai ekonomi dari aktivitas layanan pendidikan pada kedua Negara. Dampak tidak langsung (*multiplier effect*) dari peningkatan kegiatan perdagangan pada kedua Negara.

G. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi dalam penulisan ini dengan mempersempit permasalahan pada dampak kerjasama dalam dunia pendidikan dilihat dari

persepsi manfaatnya dalam hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Dan dalam penulisan ini akan membahas masalah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2008.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti buku, makalah, surat kabar. Dan juga media elektronik seperti televisi, internet serta dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan bentuk-bentuk serta manfaat daripada kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan Australia dalam dunia pendidikan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teoritik, tehnik penulisan, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II : Kerjasama Australia dan Indonesia dalam Bidang Pendidikan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah latar belakang kerjasama di bidang pendidikan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, macam-macam bentuk kerjasama, dan manfaat kerjasama.

BAB III : Dampak dari Kerjasama Australia dan Indonesia dalam Bidang Pendidikan.

Bab ini akan membahas dampak Kerjasama Australia dan Indonesia dalam Bidang Pendidikan dalam aspek politik-keamanan, sosial-budaya dan ekonomi.

BAB IV : Kesimpulan

Bab ini akan membahas sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya